



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
TAHUN 2019



LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Sidoarjo

Pada Hari Ju'mat, 08 Nopember 2019

Sekretaris Tim Survei



Dwi Puspitarini, S.E
NIP 19811206 2006 04 2 004

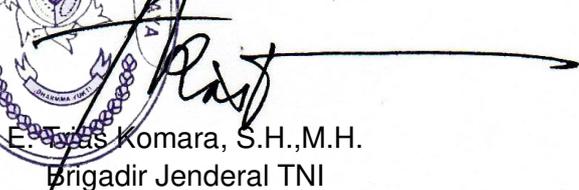
Ketua Tim Survei



Tigor Parlilitan Hasugian, S.IP.,S.H.
NIP 19690522 1992 03 1 003



Kepala Pengadilan Militer Tinggi III



E. Syas Komara, S.H.,M.H.
Brigadir Jenderal TNI



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Adapun kegiatan yang mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada masyarakat adalah dengan mengadakan Survei Indeks Persepsi Korupsi untuk membangun Zona Integritas di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Outcome dari pembangunan Zona Integritas adalah terbentuknya WBK/WBBM di satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pembangunan WBK dan WBBM secara bertahap diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya khususnya dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada umumnya. Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan dan perubahan peraturan yang memuat indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK dan WBBM, yang mengarah kepada terwujudnya **zero tolerance approach** (pendekatan tanpa toleransi) dalam pemberantasan korupsi. Perjalanan untuk mencapai Visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan badan peradilan yang agung khususnya di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membutuhkan integritas, kerja keras, komitmen, keyakinan dan kerja sama.

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Silangjaja, 10 Nopember 2019
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

E Hias Komara, S.H.,M.H.
Brigadir Jenderal TNI



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	1
1.4 Rencana Kerja	2
BAB II METODOLOGI	
2.1 Metode Penelitian	3
2.2 Populasi dan Sampel	3
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	3
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	3
2.5 Teknik Analisa Data	3
2.6 Tahapan Pelaksanaan	4
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	
3.1 Profil Responden	6
3.2 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	8
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	15
3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan	15
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Rekomendasi	18
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1 Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas	4
2.2 Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi	5
2.3 Nilai Indeks Persepsi Korupsi	5
3.1 Jenis Kelamin Responden	6
3.2 Tingkat Pendidikan Responden	6
3.3 Jenis Pekerjaan Responden	7
3.4 Kelompok Usia Responden	8
3.5 Indeks Indikator Manipulasi Peraturan	9
3.6 Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan	9
3.7 Indeks Indikator Menjual Pengaruh	10
3.8 Indeks Indikator Transaksi Biaya	11
3.9 Indeks Indikator Biaya Tambahan	11
3.10 Indeks Indikator Hadiah	12
3.11 Indeks Indikator Transparansi Biaya	12
3.12 Indeks Indikator Percaloan	13
3.13 Indeks Indikator Perbuatan Curang	14
3.14 Indeks Indikator Transaksi Rahasia	14
4 Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	15
5 Persepsi Indeks Korupsi Pengadilan Militer III Surabaya	15

**DAFTAR GRAFIK**

<i>Grafik</i>	<i>Halaman</i>
3.1 Jenis Kelamin Responden	6
3.2 Tingkat Pendidikan Responden	7
3.3 Jenis Pekerjaan Responden	7
3.4 Kelompok Usia Responden	8
3.5 Indeks Indikator Manipulasi Peraturan	9
3.6 Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan	10
3.7 Indeks Indikator Menjual Pengaruh	10
3.8 Indeks Indikator Transaksi Biaya	11
3.9 Indeks Indikator Biaya Tambahan	11
3.10 Indeks Indikator Hadiah	12
3.11 Indeks Indokator Transparansi Biaya	13
3.12 Indeks Indikator Percaloan	13
3.13 Indeks Indikator Perbuatan Curang	14
3.14 Indeks Indikator Transaksi Rahasia	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik **accidental sampling**. **Accidental sampling** adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

2.4 Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.

Adapun alur penyusunan **tools** untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 2.1
Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas



Tabel 2.2

Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2.3

Nilai Indeks Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Pelayanan		
			Mutu	Kinerja	
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

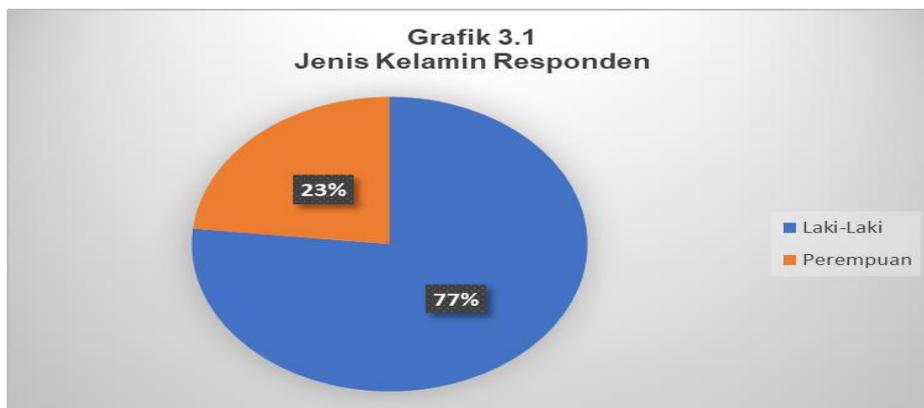
3.1 Profil Responden

3.1.1 Jenis Kelamin Responden

Dari sisi jenis kelamin responden, menunjukkan bahwa sebesar **76,67% (23 orang)** responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki jenis kelamin sebagai **Laki - Laki**.

Tabel 3.1
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kemin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	23	76,67
2	Perempuan	7	23,33
Jumlah :		30	100,00

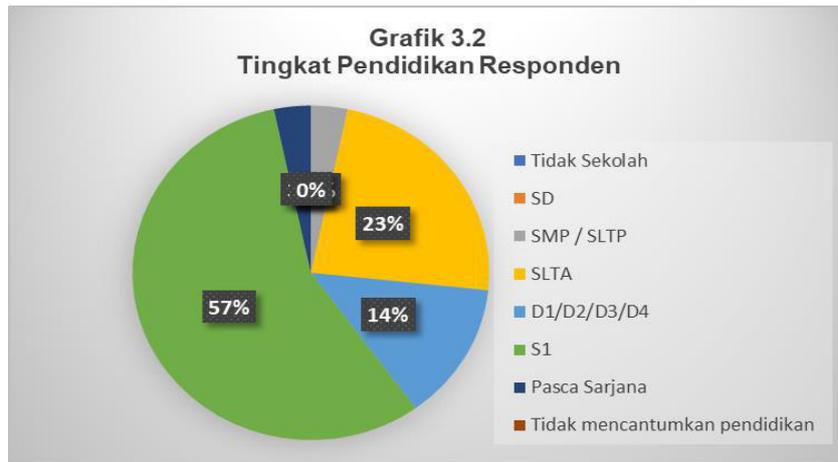


3.1.2 Tingkat Pendidikan Responden

Dari sisi tingkat pendidikan responden, menunjukkan bahwa sebesar **56,67% (17 orang)** responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki pendidikan sebagai **S1**.

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	0	0,00
2	SD	0	0,00
3	SMP / SLTP	1	3,33
4	SLTA	7	23,33
5	D1/D2/D3/D4	4	13,33
6	S1	17	56,67
7	Pasca Sarjana	1	3,33
8	Tidak mencantumkan pendidikan	0	0,00
Jumlah :		30	100,00

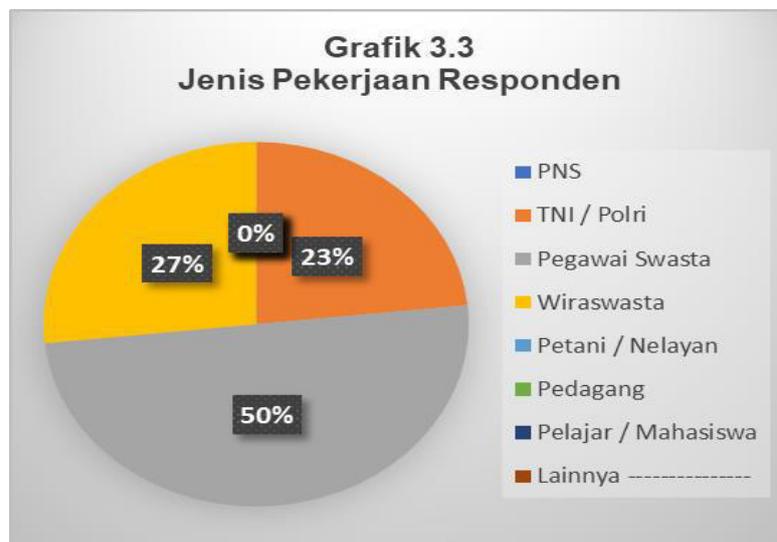


3.1.3 Jenis Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **50,00% (15 orang)** responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki pekerjaan sebagai **Pegawai Swasta**.

Tabel 3.3
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	0	0,00
2	TNI / Polri	7	23,33
3	Pegawai Swasta	15	50,00
4	Wiraswasta	8	26,67
5	Petani / Nelayan	0	0,00
6	Pedagang	0	0,00
7	Pelajar / Mahasiswa	0	0,00
8	Lainnya -----	0	0,00
Jumlah :		30	100,00

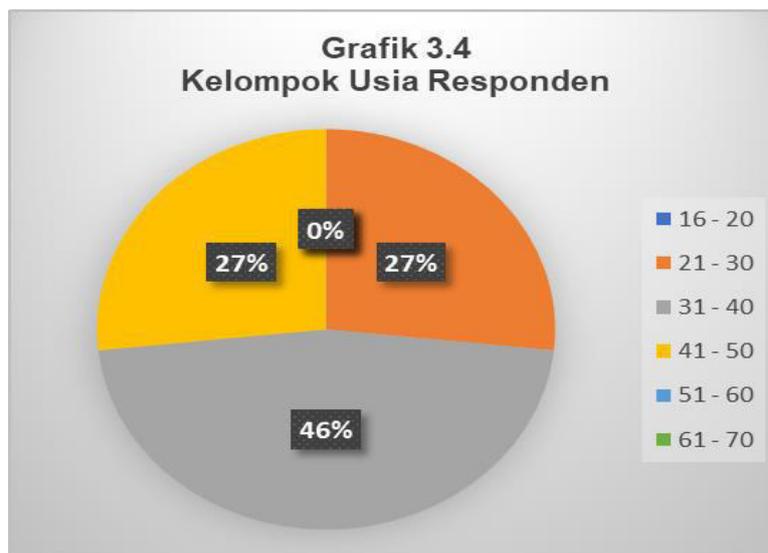


3.1.4 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **31 tahun s/d 40 tahun**. Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

Tabel 3.4
Kelompok Usia Responden

No.	Usia / Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	16 - 20	0	0,00
2	21 - 30	8	26,67
3	31 - 40	14	46,67
4	41 - 50	8	26,67
5	51 - 60	0	0,00
6	61 - 70	0	0,00
Jumlah :		30	100,00



3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

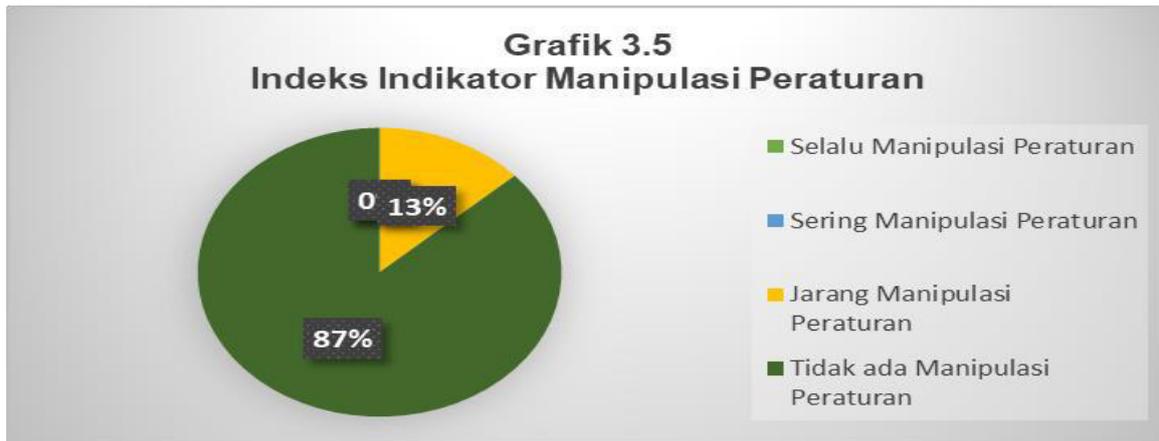
3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,87**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari tindakan manipulasi peraturan**.

Tabel 3.5.
Indeks Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu Manipulasi Peraturan	1	0	0,00	0,00
2	Sering Manipulasi Peraturan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang Manipulasi Peraturan	3	4	13,33	12,00
4	Tidak ada Manipulasi Peraturan	4	26	86,67	104,00
Jumlah :			30	100,00	3,87



3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,83**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan**.

Tabel 3.6
Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu menyalahgunakan jabatan	1	0	0,00	0,00
2	Sering menyalahgunakan jabatan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang menyalahgunakan jabatan	3	5	16,67	15,00
4	Tidak ada penyalahgunaan jabatan	4	25	83,33	100,00
Jumlah :			30	100,00	3,83



3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,87**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari tindakan menjual pengaruh**.

Tabel 3.7
Indeks Indikator Menjual Pengaruh

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu menjual pengaruh	1	0	0,00	0,00
2	Sering menjual pengaruh	2	0	0,00	0,00
3	Jarang menjual pengaruh	3	4	13,33	12,00
4	Tidak ada penjualan pengaruh	4	26	86,67	104,00
Jumlah :			30	100,00	3,87



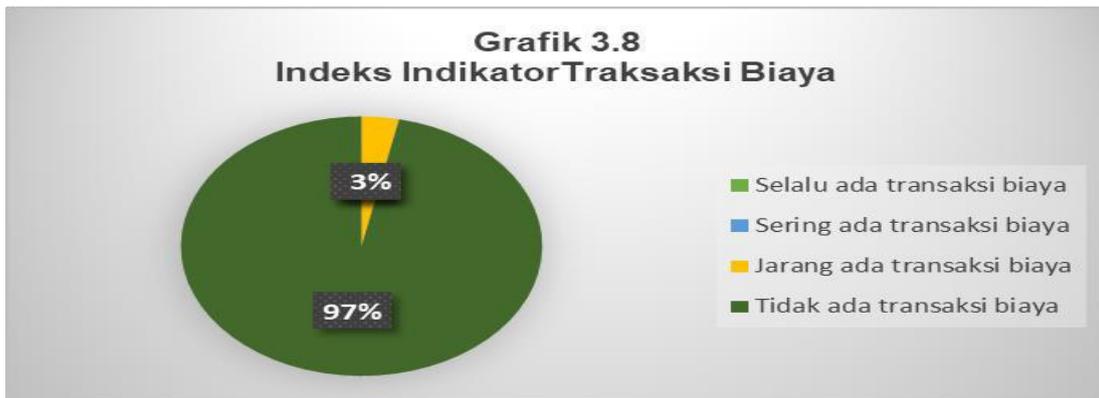
3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,97**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya transaksi biaya**.

Tabel 3.8
Indeks Indikator Transaksi Biaya

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada transaksi biaya	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada transaksi biaya	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada transaksi biaya	3	1	3,33	3,00
4	Tidak ada transaksi biaya	4	29	96,67	116,00
Jumlah :			30	100,00	3,97



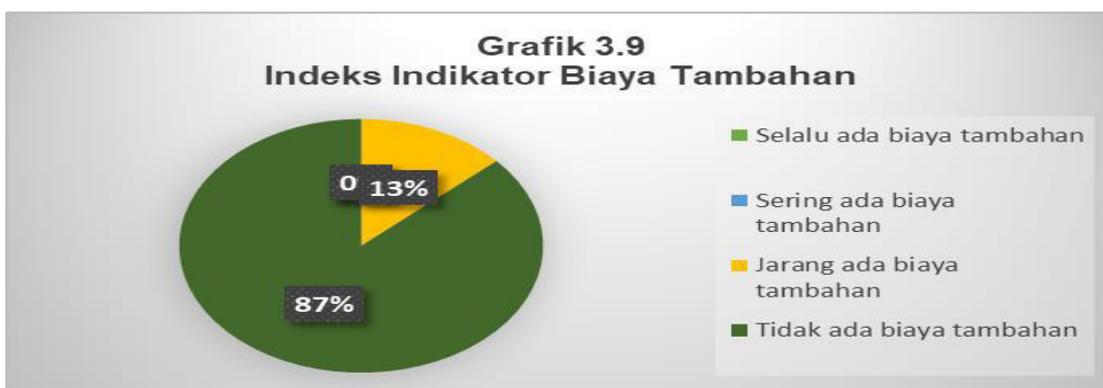
3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,87**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya biaya tambahan**.

Tabel 3.9
Indeks Indikator Biaya Tambahan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada biaya tambahan	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada biaya tambahan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada biaya tambahan	3	4	13,33	12,00
4	Tidak ada biaya tambahan	4	26	86,67	104,00
Jumlah :			30	100,00	3,87



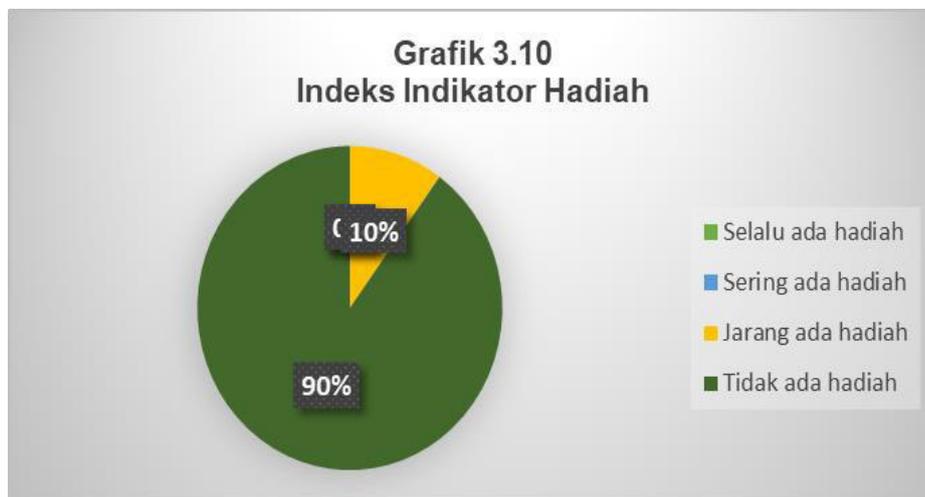
3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,90**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya pemberian hadiah**.

Tabel 3.10
Indeks Indikator Hadiah

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada hadiah	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada hadiah	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada hadiah	3	3	10,00	9,00
4	Tidak ada hadiah	4	27	90,00	108,00
Jumlah :			30	100,00	3,90



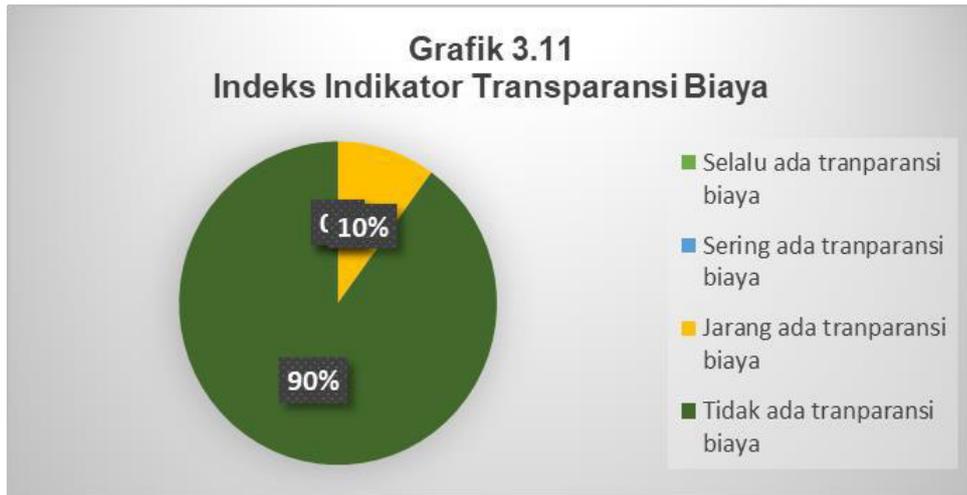
3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,90**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya transparansi biaya**.

Tabel 3.11
Indeks Indikator Transparansi Biaya

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada tranparansi biaya	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada tranparansi biaya	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada tranparansi biaya	3	3	10,00	9,00
4	Tidak ada tranparansi biaya	4	27	90,00	108,00
Jumlah :			30	100,00	3,90



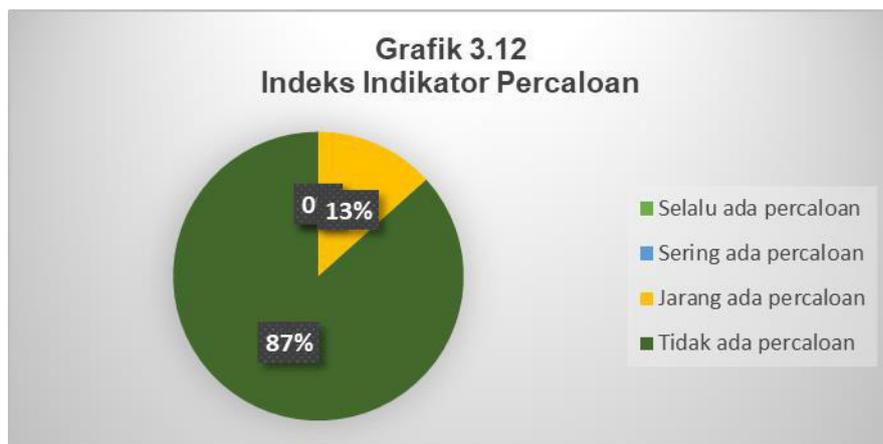
3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,87**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya percaloan**.

Tabel 3.12
Indeks Indikator Percaloan

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada percaloan	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada percaloan	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada percaloan	3	4	13,33	12,00
4	Tidak ada percaloan	4	26	86,67	104,00
Jumlah :			30	100,00	3,87



3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,93**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya perbuatan curang**.

Tabel 3.13
Indeks Indikator Perbuatan Curang

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada perbuatan curang	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada perbuatan curang	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada perbuatan curang	3	2	6,67	6,00
4	Tidak ada perbuatan curang	4	28	93,33	112,00
Jumlah :			30	100,00	3,93



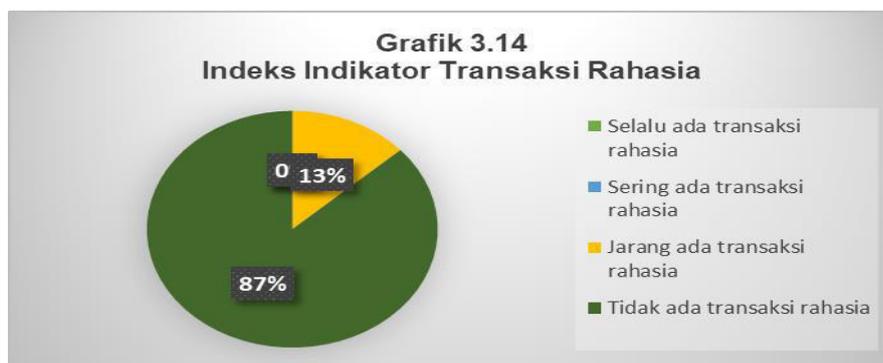
3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks rata - rata (NRR) **3,87**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya **bersih dari adanya transaksi rahasia**.

Tabel 3.14
Indeks Indikator Transaksi Rahasia

No.	Usia / Umur	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	NRR
1	Selalu ada transaksi rahasia	1	0	0,00	0,00
2	Sering ada transaksi rahasia	2	0	0,00	0,00
3	Jarang ada transaksi rahasia	3	4	13,33	12,00
4	Tidak ada transaksi rahasia	4	26	86,67	104,00
Jumlah :			30	100,00	3,87



3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 (sepuluh) indikator tersebut di atas, maka diperoleh **Indeks Persepsi Korupsi (IPK)** satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III sebesar **97,17**.

Tabel 4
Indeks Persepsi Korupsi
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

No	Ruang Lingkup (RL)	NRR per RL	NRR Tertimbang	IPK per RL	Kinerja
1	Manipulasi Peraturan	3,87	0,39	96,68	Bersih dari korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,83	0,38	95,83	Bersih dari korupsi
3	Menjual Pengaruh	3,87	0,39	96,68	Bersih dari korupsi
4	Transaksi Biaya	3,97	0,40	99,18	Bersih dari korupsi
5	Biaya Tambahan	3,87	0,39	96,68	Bersih dari korupsi
6	Hadiah	3,90	0,39	97,50	Bersih dari korupsi
7	Transparansi Biaya	3,90	0,39	97,50	Bersih dari korupsi
8	Percaloan	3,87	0,39	96,68	Bersih dari korupsi
9	Perbuatan Curang	3,93	0,39	98,33	Bersih dari korupsi
10	Traksaksi Rahasia	3,87	0,39	96,68	Bersih dari korupsi
Jumlah NRR Tertimbang :			3,89		
Indeks Persepsi Korupsi :				97,17	

Indeks **97,17** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **81,26 – 100,00**.

Tabel 5
Persepsi Indeks Korupsi
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Pelayanan		
			Mutu	Kinerja	
1	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik	Bersih dari korupsi

3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Adapun masukan dan pandangan dari responden adalah sebagai berikut :

1. Masukan dan Pandangan Responden 01
 - Harus adanya transparansi biaya;
 - Situs web agar selalu di Update agar masyarakat mudah mendapatkan informasi;
2. Masukan dan Pandangan Responden 02
 - Kualitas pelayanan ditingkatkan agar tidak ada praktek pungli dalam mengurus perkara;
 - Petugas pelayanan terkadang tidak ada di tempat;
3. Masukan dan Pandangan Responden 04
 - Agar kedepannya tidak akan ada lagi praktek percaloan di lingkungan peradilan;
4. Masukan dan Pandangan Responden 06
 - Untuk menegakkan keadilan seharusnya pengadilan harus bersih dari korupsi / percaloan;
5. Masukan dan Pandangan Responden 08
 - Semoga kedepannya sudah tidak ada praktek KKN di Pengadilan dan besar harapan agar putusan Hakim berdasarkan pertimbangan yang matang supaya dapat memberikan rasa keadilan;
6. Masukan dan Pandangan Responden 09
 - Petugas seharusnya selalu stanby di tempat sehingga memudahkan proses pelayanan;
7. Masukan dan Pandangan Responden 11
 - Semoga kedepannya sudah tidak ada praktek KKN di Pengadilan dan besar harapan agar putusan Hakim berdasarkan pertimbangan yang matang supaya dapat memberikan rasa keadilan;
8. Masukan dan Pandangan Responden 12
 - Kurang adanya informasi mengenai biaya
9. Masukan dan Pandangan Responden 14
 - Harus adanya transparansi biaya;
10. Masukan dan Pandangan Responden 17
 - Informasi yang diberikan, terkadang kurang informatif;
 - Situs web agar selalu di Update agar masyarakat mudah mendapatkan informasi;
11. Masukan dan Pandangan Responden 19
 - Kedepannya pelayanan harus semakin baik dan bisa mencegah praktek percaloan / KKN;
12. Masukan dan Pandangan Responden 21
 - Kualitas pelayanan ditingkatkan agar tidak ada praktek pungli dalam mengurus perkara;
13. Masukan dan Pandangan Responden 22
 - Petugas pelayanannya sangat ramah, semoga makin lama akan semakin lebih baik;
14. Masukan dan Pandangan Responden 24
 - Meskipun sudah tidak sebanyak dulu namun masih ada saja praktek percaloan dan iru manjadi PR bagi aparat penegak hukum untuk memberantasnya;

15. Masukan dan Pandangan Responden 25
 - Pelayanan terkadang lama;
16. Masukan dan Pandangan Responden 26
 - Untuk menegakkan keadilan seharusnya pengadilan harus bersih dari korupsi / percaloan;
17. Masukan dan Pandangan Responden 27
 - Petugas pelayanan terkadang tidak ada di tempat;
18. Masukan dan Pandangan Responden 29
 - Pelayanan sudah sangat baik;
19. Masukan dan Pandangan Responden 30
 - Besar harapan saya agar dalam mengurus perkara sudah tidak ada lagi korupsi / pungli;

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki **Indeks Persepsi Korupsi 97,17**. atau masuk pada kategori dengan mutu pelayanan **Sangat Baik** dan kinerja pelayanan **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 (sepuluh) indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 96,68;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 95,83;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 96,68;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 99,18;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 96,68;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 97,50;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 97,50;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 96,68;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 98,33;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 96,68;

4.2 Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2019 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki **indeks di atas 81,26** atau masuk pada persepsi dengan mutu pelayanan **sangat baik** dan kinerja pelayanan **bebas dari korupsi**.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Penyalahgunaan Jabatan** memiliki indeks paling rendah yakni **95,83** diantara indikator lainnya.

Kepada seluruh jajaran manajemen dan seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada semua pencari keadilan di semua ruang lingkup pelayanan yakni:

- a. Bahwa seluruh pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya harus lebih ramah dalam memberikan pelayanan, menguasai SOP dan lebih profesional dalam pelayanan
- b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bagian harus disosialisasikan lagi,
- c. Bahwa seluruh pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya harus lebih berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan dengan asas cepat, tepat dan murah

LAMPIRAN

ANALISA DATA
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
TAHUN 2019

No. Responden	NILAI KUISIONER INDEKS PERSEPSI KORUPSI										Keterangan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
11	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
13	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
14	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
15	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	
21	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
22	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
24	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	
27	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
28	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
Jumlah	116	115	116	119	116	117	117	116	118	116	
NRR per RL	3,867	3,833	3,867	3,967	3,867	3,900	3,900	3,867	3,933	3,867	
NRR Tertimbang	0,387	0,383	0,387	0,397	0,387	0,390	0,390	0,387	0,393	0,387	3,887
IKM terhadap PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN											97,17

Keterangan :

NRR : Nilai rata-rata

RL : Ruang Lingkup Pelayanan

IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat

* : Jumlah NRR IKM Tertimbang

** : Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR per RL : Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi

NRR : NRR per Ruang Lingkup x (1/9)

Tertimbang

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00

B (Baik) : 62,51 - 81,25

C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50

D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Jl. Raya Ir. Haji Juanda No. 87, Sidoarjo 61253

Web : www.dilmilti3-surabaya.go.id ; Telp/Fax 031-8671763, 8674342

Email : milti.surabaya@dilmil.org

Nomor Responden : (diisi petugas)

KUISIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i Pengguna Layanan
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr./i terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menayakan pendapat pengguna layanan mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap bapak/ibu/sdr./i.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan bapak/ibu/sdr./i untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sidoarjo, Nopember 2019

Tim Survei

**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
TAHUN 2019**

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama : _____ (boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan : _____
3. Umur (Tahun) : _____
4. Jenis Kelamin : 1. Laki – laki 2. Perempuan
5. Pendidikan terakhir : 1. Tidak sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
2. SD 6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
4. SLTA
6. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri 6. Pedagang
3. Pegawai Swasta 7. Pelajar / Mahasiswa
4. Wiraswasta 8. Lainnya _____

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei					
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Eksternal					
1.	Apakah pelayanan oleh petugas tidak sesuai prosedur dan ketentuan dan dipersulit untuk maksud tertentu ?	1	2	3	4

	(Manipulasi Peraturan)					
2.	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan oleh petugas dengan ada penawaran untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4	
3.	Apakah pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4	
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)	1	2	3	4	
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi dengan ada biaya tambahan ? (Biaya Tambahan)	1	2	3	4	
6.	Apakah ada pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	1	2	3	4	
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparasi Biaya)	1	2	3	4	
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan)	1	2	3	4	
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)	1	2	3	4	
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan ? (Transaksi Rahasia)	1	2	3	4	

Saran masukan dan pandangan pengguna layanan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya: